

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menguraikan intensitas kemandirian keuangan daerah berperan penting dalam menekan kondisi *financial distress* pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah relatif mempunyai kapasitas fiskal yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kemampuan tersebut membuat pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan transfer dari pemerintah pusat sehingga fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kuat. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih optimal dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Ketergantungan keuangan daerah atas bantuan transfer pusat belum menjadi faktor utama yang mengestimasi kondisi *financial distress* pemerintah daerah. Tingginya proporsi dana transfer merupakan kondisi yang umum terjadi pada sebagian besar pemerintah daerah sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung kondisi kesehatan fiskal daerah. Pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran tetap menjadi faktor yang lebih penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dibandingkan kuantitas dana transfer yang dihimpun pemerintah daerah.

Efisiensi belanja daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah. Pengeluaran daerah yang semakin besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin terbatas dikarenakan mayoritas anggaran digunakan demi memenuhi kebutuhan operasional ketimbang kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien diperlukan

agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Solvabilitas anggaran pemerintah daerah juga berkaitan dengan kondisi *financial distress* pemerintah daerah. Kapabilitas pemerintah daerah dalam menutup belanja operasional melalui pendapatan daerah di luar dana alokasi khusus mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran. Nilai solvabilitas anggaran yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah masih terbatas, alhasil berpotensi meningkatkan tekanan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan secara optimal agar stabilitas keuangan pemerintah daerah tetap terjaga.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada pengukuran variabel *financial distress* yang diparameterkan menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Pengukuran tersebut belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi *financial distress* pemerintah daerah secara menyeluruh karena hanya menekankan pada aspek alokasi belanja pembangunan dalam struktur anggaran daerah. *Financial distress* pada pemerintah daerah sesungguhnya dapat ditinjau melalui berbagai indikator lain seperti kemampuan likuiditas, defisit anggaran, maupun kapasitas pemenuhan kewajiban fiskal.

Keterbatasan berikutnya terletak pada variabel independen yang diaplikasikan dalam penelitian yang hanya difokuskan pada indikator keuangan pemerintah daerah. Kondisi *financial distress* pemerintah daerah pada praktiknya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh indikator nonkeuangan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat, kompleksitas administrasi, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Tidak dimasukkannya indikator nonkeuangan dalam model penelitian menyebabkan analisis yang

dilakukan belum mampu menjelaskan pengaruh faktor eksternal dan karakteristik daerah secara lebih luas terhadap *financial distress*.

Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan data penelitian yang bersumber sepenuhnya dari laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat sekunder. Data kuantitatif tersebut hanya menggambarkan kondisi numerik kinerja keuangan tanpa mampu menangkap kondisi faktual di lapangan terkait kebijakan penganggaran, proses pengambilan keputusan, maupun pertimbangan manajerial dalam pengelolaan fiskal daerah. Kondisi *financial distress* pemerintah daerah dapat dipengaruhi pula oleh kebijakan internal dan strategi pengelolaan anggaran yang tidak seluruhnya tercermin dalam laporan keuangan. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian ini belum mampu menjelaskan sisi kontekstual maupun kebijakan manajerial.

### 5.3 Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah agar penggunaan anggaran dapat diarahkan secara lebih efisien dan produktif. Pengendalian belanja perlu dilakukan secara optimal guna meminimalkan pemborosan anggaran yang berpotensi meningkatkan risiko *financial distress*. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan secara berkelanjutan melalui pengelolaan struktur fiskal yang sehat. Upaya tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung keberlanjutan pelayanan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran *financial distress* yang lebih beragam agar mampu memberikan gambaran kondisi tekanan keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif. Penggunaan indikator tambahan seperti rasio likuiditas, tingkat defisit anggaran, maupun ukuran kemampuan fiskal lainnya dapat dipertimbangkan guna memperluas perspektif pengukuran *financial distress*. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel nonkeuangan ke dalam model penelitian. Variabel seperti jumlah

penduduk, luas wilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan dapat dipertimbangkan sebagai faktor tambahan.

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis atas pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya mengenai *financial distress* pemerintah daerah. Hasil penelitian menguraikan *financial distress* tidak selalu dipengaruhi oleh seluruh indikator keuangan, melainkan lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan belanja dan kemampuan pemenuhan kewajiban keuangan daerah. Temuan tersebut memperkaya literatur mengenai determinan *financial distress* pada sektor publik.

Implikasi praktis penelitian ini merepresentasikan pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi belanja dan menjaga solvabilitas guna meminimalkan risiko *financial distress*. Pengelolaan anggaran yang efektif serta kemampuan memenuhi kewajiban keuangan secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengonsepsi regulasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal.